

## KEKUATAN OPINI PUBLIK

### Wahyudi Kumorotomo

Hari-hari ini, kita menyaksikan pengaruh kekuatan opini publik yang begitu dahsyat terhadap arah kebijakan yang diambil oleh para pejabat puncak. Ketika pejabat Polri mengungkapkan tuduhan penyalahgunaan kewenangan oleh dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dan presiden mengeluarkan Perppu yang menon-aktifkan keduanya, reaksi publik begitu keras menolak kebijakan ini. Publik justru telah mencium aroma kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam langkah presiden, Polri dan Kejaksaan Agung tersebut.

Dukungan publik kepada Bibit dan Chandra meluas dalam berbagai bentuk di seluruh tanah-air. Di dunia maya, dukungan masyarakat melalui jaringan sosial *Facebook* bergelora, dari jumlah ribuan hingga jutaan orang. Sementara itu, di hampir semua media para pengamat dan penulis mengungkapkan opini yang menentang kebijakan kriminalisasi KPK. Betapapun, publik telah melihat bahwa KPK adalah sebuah lembaga anti-korupsi yang menumbuhkan harapan baru bagi pemerintahan yang lebih bersih di Indonesia.

Opini publik yang terbentuk di dunia maya dan media selanjutnya juga menggerakkan aksi-aksi jalanan. Di hampir semua kota besar berlangsung demonstrasi yang menuntut pembebasan Bibit-Chandra. Aksi itu pada mulanya bersifat sporadis. Tetapi ternyata seiring dengan wacana tentang konflik terselubung antara Polri-Kejaksaan dan KPK, gelombang aksi terus datang beruntun. Demonstrasi tandingan oleh pelaku-pelaku bayaran yang mendukung Polri dan pengadilan atas Bibit-Chandra tidak mampu membendung demonstrasi massal yang didukung opini publik. Persaingan terselubung antara KPK dan Polri yang mengental dalam wacana “cicak” melawan “buaya” menggelinding ke ranah publik dengan mayoritas masyarakat berada di belakang komunitas “cicak”. Dalam beberapa demonstrasi di depan gedung KPK yang saya saksikan, istilah “cicak” bahkan sudah berubah menjadi akronim “Cinta Indonesia Cinta KPK”.

Tampaknya, reaksi itu di luar perhitungan presiden SBY sendiri. Itulah sebabnya, untuk meredam suara publik presiden membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari delapan orang pakar politik dan hukum. Setelah bekerja selama dua minggu di bawah sorotan publik, TPF menyelesaikan pekerjaannya dan menyampaikan rekomendasi setebal 31 halaman kepada presiden. Bola liar yang disorongkan ke TPF selanjutnya dikembalikan lagi ke presiden karena memang harus presiden sendiri yang menentukan eksekusinya. Seperti telah diketahui oleh publik, dalam sebuah pernyataan pers yang menggunakan kalimat-kalimat mengambang, presiden terpaksa memenuhi tekanan publik. Pihak Polri melimpahkan kasus Bibit-Chandra ke Kejaksaan dan kini Kejaksaan telah mengeluarkan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Penuntutan) atas kasus yang dituduhkan kepada kedua pimpinan KPK tersebut.

Namun demikian, opini publik saat ini tampaknya sudah bergerak lebih jauh. Bukan hanya ke kasus Bibit-Chandra, tetapi mengarah kepada upaya penuntasan kasus *bail-out* bank Century yang nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Sembilan orang anggota DPR yang menginisiasi hak angket terkait kasus bank Century pada mulanya terlihat gamang dan kurang percaya diri. Lagi-lagi, opini publik yang berpihak kepada mereka kemudian mendorong gagasan hak angket menggelinding deras.

Selain opini yang berkembang di media elektronik dan cetak, unjuk-rasa berbagai kota juga menghendaki diteruskannya hak angket DPR hingga tuntas. Ribuan pengunjuk-rasa juga hadir di depan gedung DPR/MPR ketika para politisi sedang mengadakan rapat paripurna Pansus bank Century. Pernyataan presiden yang mendukung pengungkapan kasus Century supaya terang-benderang juga memberi angin kepada para politisi di DPR. Oleh karena itu, dari usulan awal angket bank Century yang hanya ditandatangani oleh 139 orang, kini sebanyak 503 dari total 560 anggota DPR telah memberikan dukungannya. Kalau sebelumnya tidak ada satupun anggota DPR dari Partai Demokrat yang tanda-tangan, belakangan terdapat 148 orang dari Partai Demokrat yang ikut membubuhkan tanda-tangannya.

Memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa penggunaan hak angket oleh para anggota DPR itu akan berhasil membuka tabir kasus Century dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah. Setelah rapat paripurna memutuskan pembentukan Pansus Century, sudah banyak pihak yang khawatir bahwa Pansus ini akan dipenuhi dengan penumpang gelap. Titik pangkal kebijakan *bail-out* Century tentu bukan hanya sekadar Gubernur BI yang waktu dijabat oleh Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Tidak masuk akal bahwa para politisi di DPR dan presiden tidak tahu-menahu tentang kebijakan yang melibatkan dana publik begitu besar itu. Dalam hal ini, kekhawatiran terhadap nasib penggunaan hak angket didasari oleh logika bahwa mustahil sekelompok orang akan menyelidiki sesuatu yang sudah pasti akan menelanjangi diri-sendiri.

Perlu dicatat bahwa sampai sejauh ini, berbagai kasus penggunaan hak angket di DPR dapat diibaratkan layu sebelum berkembang. Sebut saja misalnya hak angket yang pernah dicoba digalang untuk kebijakan mengenai lumpur Lapindo, kenaikan harga BBM yang drastis, dan masalah impor beras. Pada awalnya, sekelompok wakil rakyat di dewan itu tampak lantang dan berapi-api untuk menggunakan hak angket. Tetapi kekuatan suara itu semakin loyo ketika menjelang rapat paripurna. Masyarakat hanya bisa mengira-ira bahwa lantangnya para anggota dewan itu hanya untuk menaikkan popularitas individu atau kemungkinan prosesnya terhenti oleh berbagai negosiasi politik dan kesepakatan di dalam ruang tertutup.

Betapapun, kini para tokoh elit politik harus benar-benar menakar dengan baik kekuatan opini publik yang terus berkembang terkait kasus bank Century. Tokoh politik dan pemerintah tidak mungkin menyumbat arus informasi kepada publik. Sebelum para aktivis komunitas Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat) membeberkan aliran dana bank Century kepada banyak tokoh politik di lembaga negara dan kabinet, SMS mengenai aliran dana yang informasinya konon dari PPAK itu sudah berseliweran kepada banyak pihak. Demikian pula, walaupun media massa dapat dipengaruhi oleh para pejabat untuk menseleksi berbagai berita tentang kasus ini, begitu banyak saluran di dunia maya yang dapat diakses oleh masyarakat. Semakin kasus ini ditutup-tutupi, justru akan semakin besar kecurigaan publik kepada para tokoh politik dan pejabat pemerintah.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi presiden dan para anggota DPR untuk menyingkap tabir yang masih menyelimuti kasus Century sehingga gamblang bagi semua pihak. Langkah yang akan diambil oleh presiden SBY terkait kasus Century akan sangat menentukan legitimasi pemerintahannya yang belum berumur 100 hari ini. Landasan berpikir ini sangat logis karena SBY sendiri telah mencanangkan kebijakan anti-korupsi sebagai prioritas pemerintahannya dan rakyat memilihnya kembali karena mendukung garis kebijakan tersebut.

Pada titik ini, langkah presiden dapat dikatakan “*do or doom*”. Jika dia tampil dengan langkah yang tegas sesuai dengan kehendak rakyat tanpa berniat menutup-nutupi fakta apapun terkait uang untuk bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu, maka citra pemerintahannya pada masa jabatan yang kedua ini akan terangkat kembali. Bangsa Indonesia juga akan merasa lebih bangga dengan pemimpin pilihannya dan ekonomi secara keseluruhan akan terangkat karena pemecahan masalah korupsi dilakukan sesuai dengan amanah rakyat. Sebaliknya, kalau presiden masih juga bersikap ragu-ragu dan membiarkan masalah berputar-putar tak tentu arah seperti dalam kemelut antara KPK, Polri dan Kejaksaan, legitimasi pemerintahannya bisa sangat anjlok. Tentu saja kita semua tidak menginginkan terpuruknya legitimasi pemerintah karena itu akan mengakibatkan kurang efektifnya perumusan kebijakan publik dan membahayakan stabilitas politik nasional yang susah-payah kita jaga bersama.

Pelajaran yang harus dipetik oleh para elit politik dan pejabat pemerintah dari kasus Bibit-Chandra dan kasus bank Century ialah bahwa dalam iklim demokrasi mereka tidak mungkin bisa membendung arus opini publik. Betapapun, rakyat Indonesia sudah semakin pintar dalam menilai semua hal dibalik rumusan kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik hendaknya memang dirumuskan dengan mengikuti kehendak rakyat, *public policy is public consent*. Kebenaran bisa saja ditelikung oleh para elit politik dengan memanfaatkan aturan-aturan hukum atau jargon-jargon moralitas yang disampaikan melalui pernyataan politik. Tetapi opini publik dan landasan moral yang sejati tetap tidak akan bisa dilawan. Pada akhirnya kebenaran yang sejati akan terungkap, dan sejarah selalu bisa membuktikannya.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah dosen Fisipol dan MAP-UGM